Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012

Nuvola Gloria dan Syafri Harto
(nuvola_ola@yahoo.com)

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

Abstract

This research explains about Indonesian Diplomacy for UNESCO Paten's Noken. It has already been fact to be forced by every nation and state. Multi-track Diplomacy.
Used to Foster Peace between States or Particular interest. Its authenticity on the fact that it relies on various contributions from government and non government institutions. This Article will explain how the multi-track diplomacy work to help the Indonesian Government's push UNESCO to get paten Indonesia's Noken.
Keywords: *Soft Diplomacy, Multi Track Diplomacy, Noken, Cultural Heritage and UNESCO*

Pendahuluan

Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah noken. Noken berasal dari bahasa Biak yaitu ***inokson*** atau ***inoken*** yang berarti tas yakni tas atau keranjang yang digunakan oleh kaum wanita di Papua. Noken suku Biak dibuat di Kampung Bosnik, Biak Timur. Adapun pengrajin noken di Kampung Bosni adalah "mama-mama" yang sudah lanjut usia. Noken merupakan salah satu bentuk aksesori yang paling diminati masyarakat. Noken secara historis berasal dari zaman nenek moyang di Papua.[1]

Noken merupakan kerajinan tangan khas Papua berbentuk seperti tas. Ada 250 etnis dan bahasa di Papua, namun semua suku memiliki tradisi kerajinan tangan Noken yang sama. Fungsi Noken sangat beragam namun, noken biasa dipakai untuk membawa barang seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, sampai barang-barang belanjaan. noken yang kecil biasa dipakai untuk membawa kebutuhan pribadi. Tak hanya itu, noken juga dipakai dalam upacara dan sebagai kenang-kenangan untuk tamu. Noken diusulkan pemerintah Indonesia melalui Kementerian

[1] Antara, *Noken Asal Biak Terancam Punah*, 23 Oktober 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/10/23/16413811/Noken.Asal.Biak.Terancam.Punah diakses pada tanggal 2 April 2013 jam 21.00

Kebudayaan dan Pariwisata untuk masuk dalam nominasi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO sebagai daftar yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak.[2]

Disadari atau tidak noken bersyarat dengan teknik, simbol dan budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Kekayaan noken yang ada di Papua, menjadi bukti bahwa Indonesia layak menjadi sumber budaya di daerah bagian timur yang tumbuh dan berkembang. Tradisi noken diturunkan dari generasi ke generasi. Noken terkait dengan identitas budaya rakyat Indonesia dan melalui berbagai arti simbolik dari warna dan bahan mengekspresikan kreativitas dan spiritual rakyat Indonesia khususnya di Papua.

Maraknya isu pengklaiman budaya tersebut mengakibatkan pemerintah mengambil sikap untuk menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia dengan mulai menginventarisir semua kekayaan budaya yang ada di Indonesia, baik berbentuk seni, adat istiadat, maupun permainan tradisional. Hal ini sangat perlu dilakukan demi menghindari terjadinya pengklaiman oleh negara lain terhadap budaya Indonesia dikemudian hari. Pengklaiman ini banyak terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan kekayaan budaya yang dimilikinya, sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk merebut kebudayaan Indonesia. Salah satu budaya yang harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia adalah noken.

Upaya peresmian kebudayaan ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2003, yakni pematenan wayang kulit. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero wacik, mengatakan bahwa sejak tahun 2003 kebudayaan Indonesia telah diakui oleh UNESCO dengan diraihnya sertifikat wayang sebagai warisan adikarya budaya lisan atau yang bersifat non-bendawi dalam peradaban *manusia (The Masterpiecse of Oral and Intangible Heritage of Humanity)* milik bangsa-bangsa. Pengakuan ini sebenarnya sudah dinyatakan pada tanggal 7 November 2003. Namun piagam penghargaannya baru diserahkan pada tanggal 21 Aprill 2005.[3]

Setelah wayang, pemerintah Indonesia kembali mengajukan aset budaya Indonesia untuk dipatenkan oleh UNESCO yakni keris. Keris Indonesia dinominasi tahun 2004 dan tahun 2005 ditetapkan oleh UNESCO sebagai Karya Agung Budaya Lisan dan Tak Benda Warisan Manusia. Pemerintah kembali mengajukan salah satu asset budaya Indonesia yakni batik. Batik Indonesia yang dinominasikan tahun 2008 dan dalam Sidang di Abu Dhabi ditetapkan sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia *(Intangible Cultural Heritage of Humanity)* dan masuk dalam Daftar Representatif UNESCO.[4] Pemerintah mengerahkan seluruh kalangan untuk memperjuangkan batik

---

[2] Ni Luh Made Pertiwi F. *Noken Khas Papua Memang Multifungsi*, 29 Maret 2011. <http://travel.kompas.com/read/2011/03/29/09105883/Noken%20Khas%20Papua%20Memang%20Multifungsi diakses 3 April 2013 jam 19.00

[3] Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan (Yogyakarta: Ombak, 2007), hal 173

[4] Depkominfo, Jelang Pengukuhan Batik Indonesia oleh UNESCO Menteri Ad Interim Budpar Berharap Muncul Kesadaran Sosial di Masyarakat. <http://www.depkominfo.go.id/berita/jelang-pengukuhan-batik-indonesia-oleh-unescomenteri-ad-interim-budpar-berharap-muncul-kesadaran-sosial-di-masyarakat/>, [diakses 30 Juni 2013]

agar berhasil disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia dan tidak terjadi lagi klaim yang dilakukan oleh negara lain terhadap kebudayaan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa secara mendalam. Peristiwa yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah proses mematenkan noken yang dilakukan oleh Indonesia. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian studi kasus karena akan mengarahkan penelitian pada serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti tidak memiliki ruang untuk melakukan kontrol terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian ini juga berupaya untuk memaparkan dan menggambarkan bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNESCO dalam mematenkan noken sebagai warisan budayanya. Pemilihan strategi ini berimplikasi pada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui riset perpustakaan (library research). Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya *(document analysis).* Selain itu, penulis juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Kajian Umum *Multi-Track Diplomacy*

Konsep *Multi Track Diplomacy* dikembangkan dari perdebatan yang telah berlangsung lama dalam kajian tentang diplomasi antara diplomasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah saja atau diplomasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ke masyarakat *(citizen diplomacy).* Hal ini berkembang dari ide bahwa perang dapat dihindari jika terdapat hubungan persahabatan dan pemahaman yang baik antar masyarakat, dan usaha perdamaian dapat dilakukan jika pihak-pihak yang terlibat dalam potensi dan konflik nyata berusaha untuk saling memahami posisi yang diambil oleh pihak lawan. Teknik tawar-menawar dan negosiasi yang umumnya dipandang sebagai bagian dari kontak diplomatik antar pemerintah dapat dialihkan dan diadaptasi untuk megatur keterlibatan antar warga negara dari berbagai sistem politik yang berbeda tersebut.

Multi Track Diplomacy pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan[5]. *Multi track-diplomacy* diartikan oleh Joseph Montville sebagai bentuk diplomasi gabungan antara *first track-diplomacy* (pemerintah satu negara dengan negara

[5] Daniel Wehrenfennig. *Multi Track Diplomacy and Human Security.* Human Security Journal Volume 7, Summer 2008. Hlm 81

lainnya atau antar Organisasi Pemerintahan) dan *second trackdiplomacy* (diplomasi antara organisasi non-Pemerintah). John W. McDonnal mengatakan bahwa *multitrack-diplomacy* adalah salah satu upaya resolusi konflik antar negara yang melibatkan empat aspek dalam suatu negara, yaitu; pemerintah, swasta (pelaku bisnis), rakyat dan media.[6]

Semuanya tercakup dalam sebuah model jaring-jaring yang saling terkait antara baik kegiatan, individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama untuk satu tujuan tunggal, yaitu sebuah dunia dalam perdamaian. Konsep ini merupakan sebuah ekspansi dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non-Government)* yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, ofisial dan antar-pemerintah diantara perwakilan yang ditugaskan oleh negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik/perbedaan. Bahkan warga negara biasa dari berbagai macam latar-belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu bentuk perubahan.

Multi Track Diplomacy terdiri dari 5 jalur yang kemudian berkembang menjadi 9 jalur utama dalam sebuah kerangka kerja konseptual dan praktikal, yang digunakan untuk memahami kompleksnya sistem dari kegiatan perwujudan perdamaian, yakni antara lain:[7]

1. Jalur Resmi yang Bersifat Kenegaraan

   Pemerintah (Perwujudan perdamaian melalui diplomasi); bidang ini mencakup bagaimana proses formal diplomasi, perumusan kebijakan dan pembangunan perdamaian melalui ofisial dan institusi pemerintahan dijalankan.

[6] McDonald, J. W., & Bendahmane, D. R. Conflict Resolution: Track Two Diplomacy. Washington, DC: US. Government Printing Office.1987. hal 10-14.

[7] The Institute for Multi-Track Diplomacy, Nine Tracks in the Multi-Track System.

2. Jalur informal non pemerintah (perwujudan perdamaian melalui resolusi konflik)

   Jalur ini menekankan pada para pemegang karir professional non governmental (non pemerintah) untuk melakukan tugas dan fungsinya. Pihak ini berusaha untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan dan mengakomodasi konflik internasional oleh aktor-aktor bukan negara.

3. Bisnis (Melalui perdagangan)

   Bidang ini adalah tempat kegiatan-kegiatan bisnis menjalankan peran actual dan potensialnya dalam pembangunan perdamaian melalui provisi kesempatan ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal dan mendukung kegiatan perwujudan perdamaian lainnya.

4. Warga Negara (Keterlibatan Personal)

   Dalam jalur ini menekankan pada warga negara individual dapat berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian melalui citizen diplomacy, program pertukaran, organisasi voluntari swasta, NGO dan kelompok kepentingan tertentu.

5. Penelitian, Pelatihan dan Edukasi (Melalui Pembelajaran)

   Jalur ini mencakup tiga kajian kerja, antara lain: Penelitian yang berhubungan dengan program-program universitas, think tanks dan pusat penelitian kelompok-kelompok kepentingan khusus; Program Pelatihan yang mencari untuk menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik dan fasilitasi third-party; dan Edukasi termasuk proses pendidikan formal dari TK sampai ke tingkat Doktoral yang mencakup berbagai macam aspek global mengenai studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, dan konflik analisis, manajemen dan resolusi.

6. Aktivis (Melalui advokasi)

   Jalur ini melingkupi aktivisme perdamaian dan *environmental* mengenai beberapa hal seperti *disarmament*, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kepada kelompok kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu pemerintah.

7. Agama (Melalui Kepercayaan)

   Jalur ini mempelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan berorientasi perdamaian yang dilakukan oleh komunitas spiritual dan religius serta beberapa gerakan berbasis moral seperti pacifisme, *sanctuary* dan anti-kekerasan.

8. Pendanaan (melalui penyediaan aset)

   Jalur ini terkait langsung dengan komunitas funding; yaitu mereka yang baik yayasan maupun filantropis individual yang meyediakan dukungan finansial untuk banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh jalur-jalur lainnya.

9. Media (melalui komunikasi dan informasi)

Di sini adalah tempat bagi suara semua orang yaitu bagaimana opini publik dapat dibentuk dan diekspresikan melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik dan seni.

Untuk itu, Multi track Diplomacy harus dilihat sebagai suatu sistem yang menyeluruh *(a system of a whole)*. Dalam kasus ini track ataupun jalur yang digunakan adalah dilakukan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, bisnis, warga negara, Penelitian, Pelatihan dan Edukasi, serta jalur komunikasi dan media. Berikut akan dijelaskan mengenai apa-apa saja yang telah dilakukan oleh jalur/track tersebut dalam memperjuangkan noken agar berhasil dipatenkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia.

Diplomasi Indonesia Dalam Peresmian Noken

Noken merupakan budaya warisan yang sudah ada bahkan sebelum negara Indonesia ini ada. Nilai yang terkandung dalam motif dan bahan noken hingga kini masih terjaga. Para pembuat noken yang masih masih ada hingga kini sangat mensyukuri atas budaya yang merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, karena disetiap prosesnya menyimpan makna dan arti yang begitu dalam. Bahkan mereka sangat menginginkan para generasi muda belajar menganyam noken dan mencintai noken. Agar regenerasi tidak akan pernah putus, dan noken akan terus dikenal dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia adalah kekayaan bangsa ini yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai negara lain merebut kekayaan negara ini. Berbagai upaya dilakukan oleh seluruh kalangan dalam memperjuangkan noken agar berhasil dipetankan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan agar budaya noken dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, menaikkan derajat para pengrajin noken yang sudah mulai dilupakan, dan agar budaya Indonesia tidak kembali diklaim oleh Malaysia, seperti yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tari pendet, reog ponorogo dan bahkan batik juga diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan seluruh kalangan bangsa Indonesia yakni dengan cara menunjukkan bukti-bukti mengenai sejarah dan keistimewaan noken sebagai budaya warisan. Adapun UNESCO meresmikan noken sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 4 Desember 2012 dalam sidang ke 7 UNESO di Paris. Berikut akan dipaparkan jalur-jalur yang dilakukan dalam memperjuangkan noken :

Diplomasi Melalui Pemerintah *(Government)*

Pemerintah merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan noken agar diakui oleh dunia internasional melalui Organisasi Internasional Non-Pemerintah yakni UNESCO adalah melalui jalur *Government to Government (G to G)*. Jalur ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini dilakukan diwakilkan oleh Departemen Luar Negeri yang menginstruksikan kepada Perwakilan Indonesia di negara-negara lain agar dapat melakukan upaya diplomasi terhadap noken agar noken dikenal oleh masyarakat internasional.

Sejak tanggal 5 s/d 23 Februari 2011 pemerintah telah melakukan penelitian lapangan dan melibatkan komunitas serta ahli noken untuk membentuk Tim Sembilan. Tim nominasi noken ini dibentuk atas kerjasama Kemenbudpar, Kemenkokesra dan Pemda Papua dan Papua Barat yang melakukan penelitian langsung di beberapa daerah kabupaten/kota/provinsi dalam Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Tim nominasi noken yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang terdiri dari staf litbang, akademisi seni Bandung dan Direktur/Peneliti *Ecology Papua Institute-EPI* yang berasal dari tanah Papua. Mereka telah berkomunikasi langsung dan sambil bertanya untuk mengisi daftar kuisioner yang dikirim ke UNESCO pada bulan Maret 2011. Hal ini seputar cara budi-daya dan cara pengambilan bahan alami dan bagaimana cara mengelola sampai cara rajut dan anyam secara langsung[8].

Pemerintah merupakan aktor yang paling utama dalam melakukan diplomasi. Dalam hal ini akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperjuangkan noken agar disahkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya Indonesia, diantaranya:

1. Sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan penelitian lapangan dan melibatkan komunitas serta ahli noken untuk membentuk Tim Sembilan agar dapat menominasikan noken sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak dari UNESCO.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pameran Warisan Budaya TakBenda di Atrium Mangga Dua Square, kawasan Mangga Dua Jakarta Utara pada hari Sabtu-Minggu, 8-9 Desember 2012. Pameran menampilkan beragam profil warisan budaya takbenda seperti Tenun Nusa Tenggara Timur, Noken Papua serta angklung yang telah diresmikan UNESCO.
3. Sistem Noken dalam perjalanannya mendapat apresiasi oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya putusan MK bahwa Sistem Noken ini digunakan dalam Pemilu. Tapi sebelumnya Sistem Noken ini sudah digunakan oleh rakyat di wilayah Mepago dan Lapago (Pegunungan Tengah) jauh sebelum putusan MK diturunkan.
4. Perwakilan RI dan 26 anggota Komite Warisan Dunia yang dihadiri wakil dari 189 negara memegang peranan penting dalam memperkenalkan noken secara luas kepada anggota tim juri, sehingga mereka lebih seksama mempelajari dokumen nominasi noken Indonesia.

[8] Titus Pekei, hlmn 130

5. Wamenlu dan Deputi Wakil Tetap RI (Dewatapri) akan menyelenggarakan *World Cultural in Development Forum* (WCF) pertama yang rencananya akan diselenggarakan di Bali November 2013 dan memamerkan noken sebagai warisan budaya Indonesia.

Diplomasi Melalui Lembaga Non Pemerintah

Pemerintah Indonesia tidak hanya melakukan diplomasi terhadap pemerintah negara lain, namun juga melakukan diplomasi kepada lembaga non pemerintah yakni UNESCO. Berbagai langkah yan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap UNESCO sebagai organisasi internasional non pemerintah agar noken dapat disahkan sebagai budaya warisan Indonesia adalah dengan melalui:[9]

1. Lembaga Ekologi Papua dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan beberapa bukti bahwa noken adalah khas Indonesia terutama dari segi proses produksinya, bahan yang digunakan, dan arti dari setiap motif pun berbeda-beda di setiap daerah dan menggambarkan kehidupan manusia.
2. Sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan penelitian lapangan dan melibatkan komunitas serta ahli noken untuk membentuk Tim Sembilan agar dapat menominasikan noken sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak dari UNESCO.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dan Event Organizer (EO) dari Jakarta mengadakan pameran/expo Papua yang dilaksanakan di Convention Center Jakarta, pada 3-7 April 2013. Pameran ini harus mendahulukan mama-mama noken untuk menghadiri pameran tersebut

Diplomasi Melalui Warga Negara *(Citizen)*

Gagasan mendaftarkan noken ke UNESCO *(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)* muncul pada tahun 2008. Pencetusnya Titus merasa iri kepada keris dan batik yang mendapat pengakuan lebih dahulu. Padahal Papua dan Papua Barat punya segudang warisan budaya yang pantas mendapat pengakuan dunia.[10]

Titus lantas berdiskusi dengan sejawatnya, Yulianus Keayo, staf di Kemendikbud. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka bersepakat membawa noken untuk diajukan sebagai warisan budaya tidak benda kepada UNESCO. Titus lalu mendaftarkannya ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Menbudpar saat itu, Jero Wacik, langsung menyetujui[11].

---

[9] *Ibid* hlmn 135
[10] *Pekei, Titus.. hlmn* 90
[11] *ibid*

Hampir setiap kota di Papua, Titus Pekei pernah mengunjunginya demi meneliti tentang noken. Begitu besar jasa Pekei selama penelitian hingga mendaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Klemen Tinal, sangat apresiasi dan menghargai terhadap perjuangan panjang dari peneliti noken ini. Adapun Titus Pekei selain penggagas utama noken ke UNESCO, ia juga Peneliti dan Ketua pada lembaga Ekologi Papua, pengajar tamu di beberapa perguruaan Tinggi Jakarta dan Papua, Staf penegakkan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Staf Pelaksana Ahli Lingkungan Kementerian Percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia tahun 2003

Diplomasi Melalui Pendidikan *(Education)*

Dalam kegiatan edukasi memiliki peran yang penting dalam memperkenalkan noken, yakni dengan melalui penelitian, dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah ataupun lembaga pemerhati kebudayaan lainnya.

1. Diskusi bedah buku dengan judul *Cermin Noken Papua* pada tanggal 17 Mei 2012, dilaksanakan di Asrama Papua kamasan Satu Yogyakarta. Diskusi diadakan langsung dengan pembicara Peneliti EPI sekaligus sebagai penulis buku oleh Bapak Titus Pekei. Hal ini bertujuan mendapat masukan, usulan dan koreksi atas informasi dan data format pengisian nominasi yang ditetapkan oleh UNESCO.
2. Noken tas khas anyaman multifungsi kerajinan tangan rakyat Papua dimasukan ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Diplomasi Melalui Media

Komunikasi dan media menjadi salah satu jalur yang sangat penting dalam memperjuangkan hak paten terhadap noken. Komunikasi yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh semua pihak, yakni dengan cara mengkomunikasikan data-data tentang keistimewaan batik. Sedangkan media yang dalam hal ini dapat berupa media elektronik dan media cetak menjadi sangat penting karena dapat membentuk *opini public* yang baik terhadap suatu isu yang sedang berkembang.

Media elektronik melakukan perannya dengan menayangkan acara-acara yang mempublikasikan tentang noken dan sejarah noken. Serta melakukan *talk show* mengenai noken. Media cetak juga banyak menulis artikel mengenai noken. Seperti Jurnal, Majalah Diplomasi Indonesia, buku-buku ataupun artikel kebudayaan lainnya.

Demi noken ke depan, Titus Pekei menjaring ke semua media lokal, nasional dan beberapa media asing agar pemerintah di Papua baik provinsi dan kabupaten di tanah Papua

bangun penguatan agar lebih dikenal orang. Kalau sudah dikenal, Pemda tidak akan sulit ketika promosikan atau mencari pasar noken keluar Papua.

Festival Media yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia berlangsung selama 2 (hari) pada tanggal 28-29 September 2012 di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoermantri, Kompleks Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Hal ini terlihat jelas masyarakat Indonesia sudah mulai memberikan perhatian terhadap budaya lokal bagian timur. Banyak para pengunjung yang membeli noken dan mengunjungi setiap stand. Beberapa Warisan Budaya Indonesia lainnya pun juga banyak diminati.[12]

Proses Upaya Meresmikan Noken Oleh UNESCO

Salah satu tugas UNESCO adalah melindungi warisan budaya dunia agar tetap terjaga keberadaannya di tengah perkembangan zaman. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa kegiatan UNESCO dipusatkan pada 3 bidang, yakni ilmu pengetahuan, kebudayaan dan komunikasi. Dalam kegiatan kebudayaan UNESCO terkonsentrasi pada penyelamatan warisan budaya. Hal ini sesuai dengan konvensi mengenai Perlindungan Kebudayaan Dunia dan Warisan Alam 1972.

Sebagai hasil rekomendasi terutama dalam rangka melestarikan dan mengembangkan noken di masa mendatang, antara lain dipandang perlu untuk mendirikan Museum Noken di Papua. Sejak saat itu Lembaga Ekologi Papua banyak melalukan lobby dan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait dan juga pemerintah. Hal ini dilakukan selain dalam rangka mendirikan Museum Noken juga mempersiapkan berbagai kegiatan lainnya yang diperlukan.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan antara lian diskusi, seminar buku, dan pendekatan ke pemerintah serta usulan lain yang muncul, bahwa Indonesia perlu secara sungguh-sungguh melakukan upaya pelestarian budaya Noken. Untuk itu, salah satu cara yang harus ditempuh adalah menominasikan noken kepada UNESCO agar menjadi *Intangible Cultural Heritage* (Warisan Budaya Tak Benda).[13]

Dalam kaitan ini dan dalam rangka menyamakan persepsi mengenai hal tersebut, Lembaga Ekologi Papua dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan beberapa bukti bahwa noken adalah khas Indonesia terutama dari segi proses produksinya, bahan yang digunakan, dan arti dari setiap motif pun berbeda-beda di setiap daerah dan menggambarkan kehidupan manusia.

---

[12] http://tabloidjubi.com/2013/09/30/noken-laris-manis-diakhir-fesmed/ diakses pada tanggal 11 Agustus 2013

[13] Indian Journal of Traditional Knowledge, *Ethnobotanical aspect of Noken: Case Study in High Mountainn Indigenous community of Papua Island, Indonesia*. Vol 12 (2) April 2013 hlmn 206-206

Proses persiapan nominasi ini beranjak dari kesepakatan dan kebulatan tekad dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan noken, yang telah bekerja sama memahami pentingnya memperjuangkan agar noken Indonesia mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai *Intangible Cultural Heritage* maka berbagai proses persiapan terus dilakukan. Prosedur yang ditempuh adalah sesuai dengan Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda. Konvensi UNESCO ini juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui PP No. 78 tahun 2007 dan terhitung sejak 15 Januari 2008, Indonesia telah resmi menjadi Negara Pihak Konvensi. Dengan demikian Indonesia berhak menominasikan kekayaan mata budaya yang dimiliki untuk dicantumkan dalam Daftar Representatif atau Daftar Yang Segera Membutuhkan Bantuan UNESCO[14].

Sesuai dengan informasi terakhir yang diperoleh dari pihak UNESCO terutama setelah diselenggarakannya Sidang Umum *The 2nd Session of General Assembly of the States Parties to the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* di kantor pusat UNESCO di Paris tanggal 16-19 Juni 2008, maka pada tanggal 25 Juni 2008 telah diperoleh format nominasi dan petunjuk pengisiannya. Maka dari itu pemerintah Indonesi mengisi formulir nominasi untuk meresmikan noken melalui UNESCO.

UNESCO memasukkan noken ke dalam *Representative List* karena telah memenuhi kriteria, antara lain kaya dengan simbol-simbol dan filosofi kehidupan rakyat Papua; memberikan kontribusi bagi terpeliharanya warisan budaya tak benda pada saat ini dan di masa mendatang. Selanjutnya seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah melakukan langkah-langkah secara berkesinambungan untuk perlindugan termasuk peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas termasuk aktivitas pendidikan dan pelatihan.

Noken semestinya kembali menyadarkan manusia Papua apa yang menjadi hak mereka dan mana yang bukan. Harapan dan target akan kampanyekan noken di mana setiap kali pelantikan gubernur/bupati/wali kota maka kepala sukunya harus membawa noken suku atau daerah masing-masing. Misalnya dari Sentani maka harus membawa noken khas Sentani. Ini bukan membedakan atau membuat jarak tapi menjiwai tugas dan tanggung jawab. Ini juga merupakan salah satu alasannya kenapa Noken diterima UNESCO karena noken punya nilai-nilai yang cukup tinggi serta sejarah yang panjang. Noken tidak bisa digantikan dengan noken lain[15].

Dengan segala pertimbangan maka akhirnya noken atau tas rajutan khas Papua akhirnya diakui sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda dalam Sidang UNESCO di Paris, Prancis pada

[14] Opcit Depkominfo. *Jelang Pengukuhan Batik Indonesia oleh UNESCO Menteri Ad Interim Budpar Berharap Muncul Kesadaran Sosial di Masyarakat.*

[15] http://www.wilayah.papua.us/2012/12/lukisan-kulit-kayu-kombouw-sentani.html diakses pada tanggal 3 November 2013 jam 21.00

tanggal 2 Desember 2012 lalu. Keputusan itu diketuk palu oleh Arley Gill dari Grenada yang menjadi ketua Sidang Komite Antar-Pemerintah ke-7 untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda dan pengakuan UNESCO ini akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat[16].

Depbudpar menyatakan masuknya noken dalam UNESCO *Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity* merupakan pengakuan internasional terhadap salah satu mada budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin noken dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesimpulan

Upaya Indonesia dalam meresmikan noken sebagai warisan budaya Indonesia melibatkan seluruh kalangan baik itu pemerintah, lembaga swasta, pengrajin, pebisnis, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan noken ini melibatkan seluruh kalangan dalam menggunakan seluruh track/jalur. Dalam ilmu hubungan internasional istilah ini dikenal dengan *Multi Track Diplomacy*.

Dengan segala pertimbangan maka akhirnya Noken atau tas rajutan khas Papua akhirnya diakui sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda dalam Sidang UNESCO di Paris, Prancis pada tanggal 2 Desember 2012 lalu. Keputusan itu diketuk palu oleh Arley Gill dari Grenada yang menjadi ketua Sidang Komite Antar-Pemerintah ke-7 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda dan pengakuan UNESCO ini akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya Noken, yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan segala proses yang panjang dan berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya perjuangan bangsa Indonesia berbuah manis. Pada tanggal 4 Desember 2012 noken resmi disetujui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda yang dihasilkan oleh Indonesia. Proses pengukuhan noken dimulai tahun 2011 Indonesia menyerahkan berkas mengenai noken ke UNESCO sebagai nominasi Daftar Representatif sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia *(representative list of the intangible cultural heritage of humanity)*. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2012 noken diterima secara resmi oleh UNESCO tentunya setelah pemerintah Indonesia melakukan beberapa pembuktian bahwa noken merupakan budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

[16] Banyak warisan Papua berpotensi susul Noken diakses pada http://www.papuapos.com/index.php/seputar-jayapura/port-numbay/item/564-banyak-warisan-papua-berpotensi-susul-noken tanggal 1 nOVEMBER 2013 jam 19.10

Akhirnya pengakuan diputuskan terhadap budaya noken sebagai budaya milik Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 2012 diumumkan dalam siaran pers di portal UNESCO bahwa noken dimasukkkan ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia *(representative list of the intangible cultural heritage of humanity)* dalam sidang ke-7 Komite Antar Pemerintah *(fourth session of the intergovernmental committee)* tentang Warisan Budaya Tak Benda di Paris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andri Hadi. Bahan Seminar *"Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan Tantangan dalam Era Globalisasi".* 2009. Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI.

Buku Diplomasi Indonesia 2011. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Earnest Satow Sir. *Guide To Diplomatic Pratice*. Dalam bukunya S.L.Roy. *Diplomasi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1995.

J.W.M Bakker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1984.

Jack C. Plano dan Robert E.Rigs, Helena S. Robin. *Kamus Analisis Politik*. Jakarta: Rajawali Pers 1985.

John T. Raoukre. *International Politics on The World Stage.* USA, 2001.

Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia, Djambatan*. Jakarta: Djambatan, 2002.

McDonald, J.W. & Bendahmane, D.R. *Conflict Resolution*: *Track Two Diplomacy.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Pengetahuan Dasar Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa*.

R. Soeprapto. *Hubungan Internasional sistem, interaksi dan perilaku*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997.

Skripsi Melvia Fitri, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, 2010.

Sodjuangan Situmorang, "Pentingnya Dokumentasi Toponimi untuk Mendukung Tata Pemerintahan yang Baik", makalah dalam *The 13th Asia South East & Pacific South West Divisional Meeting*. Jakarta. 2006

Tamotsu Hozum. ***Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia*** *Versi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia

Titus Pekei. *Cermin Noken Papua: Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani.* Papua: Ecology Papua Institute-EPI.

Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan*. Yogyakarta: Ombak 2007

Washington DC: US. Government Printing Office. 1987.

Jurnal

Arantzazu Acha De La Pesa (Utusan UNESCO Asia dan Pacific*), Konvensi Warisan Dunia Unesco (Pengantar Proses Perlindungan Dunia)*. Disampaikan pada : International Conference and Seminar Malikussaleh : Past, Present and Future dig EDUNG ACC Unimal, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia tanggal 11-12 Juli 2011.

C.P.F Luhulima. Peranan Diplomasi *Multi-track* dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan; Upaya dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 5(2)*

Daniel Wehrenfennig. *Multi Track Diplomacy and Human Security.* Human Security Journal Volume 7, Summer 2008.

Depkominfo. *Jelang Pengukuhan Batik Indonesia oleh UNESCO Menteri Ad Interim Budpar Berharap Muncul Kesadaran Sosial di Masyarakat.*

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri. Deklarasi Solo, Upaya Penjagaan dan Perlindungan Warisan Budaya. *Opini Juris* Volume 1 Oktober 2009

Herning Suryo. Total Diplomasi dan Pencitraan Indonesia. jurnal Trans*formasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012*

Indian Journal of Traditional Knowledge, *Ethnobotanical aspect of Noken: Case Study in High Mountainn Indigenous community of Papua Island, Indonesia*. Vol 12 (2) April 2013

Ole Jacob Sending, Vincent Pouliot dan Iver B.Neumann. 2011. The Future of Diplomacy; Changing Practices, evolving relationships**.** *International Journal, Summer 2011*. Canada: Canadian International Council.

Website

Antara, *Noken Asal Biak Terancam Punah*, 23 Oktober 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/10/23/16413811/Noken.Asal.Biak.Terancam.Punah diakses pada tanggal 2 April 2013 jam 21.00

Jodhi Yudono, *Indonesia Perjuangkan Noken ke UNESCO*, 29 November 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/11/29/21550863/Indonesia.Perjuangkan.Noken.ke.UNESCO diakses pada 3 April 2013 jam 20.00

John W. McDonald. *Multi-track diplomacy,* September 2003. http://www.beyondintractability.org/bi-essay/multi-track-diplomacy diakses pada 5 April 2013 jam 23.20

Klaim Budaya, http://budaya-indonesia.org/p/6 tanggal 7 April 2013 jam 19.20.

Ni Luh Made Pertiwi F. *Noken Khas Papua Memang Multifungsi*, 29 Maret 2011. <http://travel.kompas.com/read/2011/03/29/09105883/Noken%20Khas%20Papua%20Memang%20Multifungsi diakses 3 April 2013 jam 19.00

Noken woven bag from Papua, Indonesia, inscribed on UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, 5 Desember 2012. http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=16217&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html diakses pada 5 April 2013 jam 22.00